

---

# Refleksi Teologi Perjuangan Kaum Muslim Bima Melawan Imperialisme Kolonial Belanda Dalam Perang Ngali (1908 – 1909)

Alan Ksatrya Bhuana & Sumaryoto  
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, Indonesia

---

## ABSTRACT

This study discusses the beginning of the arrival of Islam in Bima, knowing the process of Islam's entry as the identity of the Bima people, the occurrence of the Ngali war incident so that Bima Muslims were also involved in the Ngali War which took place in (1908 - 1909). The research method used in this study is the historical method which consists of several stages, including heuristics, namely techniques for collecting and classifying sources, verification, namely techniques for criticizing sources in obtaining the truth and validity of sources, interpretation, which is a technique for analyzing and synthesizing a number of facts from sources found. . The results of the research obtained by the author found several historical facts regarding the Dutch colonialism of the Bima community and the reasons the Ngali people rejected the presence of Dutch colonialism. This resistance occurred because the people of Ngali Village refused to collect taxes which were very burdensome to the community in general, while another reason was the views of the people of Ngali Village. So that the people of the village of Ngali refused and put up a fight in order to maintain the dignity of Muslims and to maintain the sanctity of Islam. Therefore, by the author, the Ngali war can also be considered as a civil war, as in religious terminology.

**Key Words:** Reflection on Theology, Muslims, Bima, Dutch Imperialism, The War of Ngali.

---

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang awal mula masuknya Islam di Bima, mengetahui proses masuknya Islam sebagai identitas masyarakat Bima, terjadinya peristiwa perang Ngali sehingga umat Islam Bima pun ikut terlibat dalam Perang Ngali yang terjadi pada tahun (1908 – 1909). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain heuristik yaitu teknik pengumpulan dan pengklasifikasian sumber, verifikasi yaitu teknik mengkritisi sumber dalam memperoleh kebenaran dan keabsahan sumber, Interpretasi yaitu suatu teknik analisis dan sintesis sejumlah fakta dari sumber yang ditemukan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis menemukan beberapa fakta sejarah mengenai penjajahan kolonialisme Belanda terhadap masyarakat Bima dan alasan masyarakat Ngali menolak kehadiran kolonialisme Belanda. Perlawanan ini terjadi karena masyarakat Desa Ngali menolak adanya pungutan pajak yang sangat memberatkan masyarakat pada umumnya, sedangkan alasan lainnya adalah pandangan masyarakat Desa Ngali. Sehingga masyarakat desa Ngali menolak dan melakukan perlawanan demi menjaga harkat dan martabat umat Islam serta menjaga kesucian agama Islam. Oleh karena itu, oleh penulis perang Ngali dapat juga dianggap sebagai perang sabil sebagaimana terminologi agama.

**Kata Kunci:** Refleksi Teologi, Kaum Muslim, Bima, Imperialisme Belanda, Perang Ngali.

---

**Penulis Korespondensi:** (1) Alan Ksatrya Bhuana (2) Universitas Indraprasta PGRI , (3) TB. Simatupang,, Jakarta, dan Indonesia, (4) Email: [alanksatrya@gmail.com](mailto:alanksatrya@gmail.com)

Copyright © 2021. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

## PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia kalau kita telusuri lebih mendalam maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pergolakan perjuangan lokalitas kedaerahan. Beberapa daerah yang memiliki pengalaman panjang berhadapan secara fisik dengan bangsa kolonial Belanda yang selalu menindas dan menghegemoni kaum pribumi. Kesamaan nasib dan penderitaan dialami inilah yang menjadi bahan dasar apabila terjadi gerakan perlawanan terhadap penjajah, salah satunya Bima.

Bima merupakan salah satu daerah penyokong kemerdekaan Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara, Bima terletak diujung timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masa lalu Bima merupakan salah satu pusat kekuasaan Islam yang terpenting di Pulau Sumbawa, bahkan di kawasan Nusa Tenggara yang memiliki luas wilayah diperkirakan 4.870 km atau 1/3 dari luas pulau Sumbawa. Wilayah Bima sekarang ini mempunyai batas-batas, sebelah barat dengan kabupaten Dompu, sebelah timur dengan selat Sape, sebelah utara dengan laut Flores, dan sebelah selatan dengan samudera Indonesia (<http://www.bimakab.go.id>, 2006).

Secara kesatuan wilayah dan orang – orangnya, Bima diikat oleh tiga ungkapan yakni *Dana Mbojo* (Daerah Bima), *Dou Mbojo* (Orang Bima), *Nggahi Mbojo* (Bahasa Bima). Ketiga ungkapan bermaksud untuk menegaskan satu kesatuan sikap yang tidak terpisahkan dalam menumbuhkan rasa kesatuan daerah. Seperti gejala dialog yang ditunjukkan pada saat perjumpaan pertama antara orang Bima yang belum pernah saling mengenal dengan kalimat bertanya *Dou mbojo kombi ita ?* (apakah anda orang Bima?) lalu oleh yang lainnya disambung dengan kalimat menjawab *oi la mada dou mbojo* (iya, saya orang Bima). Kehidupan sosial dan budaya orang Bima tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama Islam seperti yang terjadi sebelum tahun 1908, penataan hukum, sosial, dan budaya orang Bima dijalankan berdasarkan azas keislaman. Pelaksanaan tugas pokok “syara’ hukum” dilakukan oleh lembaga yang dinamakan Mahkamah Syar’iyah. Didalam Mahkamah Syar’iyah itu terdapat bagian – bagian atau satuan organisasi yang menata aspek – aspek kehidupan yang menyangkut pemerintahan dan masyarakat Bima.

## METODE

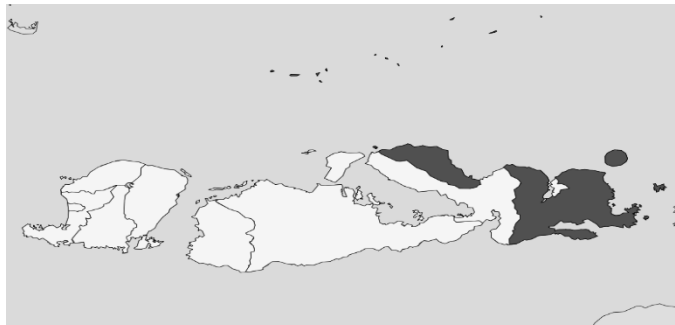
Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah, metode penelitian sejarah lazim disebut metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara jalan atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Oleh karena itu metode sejarah dalam pengertiannya yang umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dan teknik penulisannya tidak terlepas dari cara-cara menghimpun dan mengolah sumber-sumber atau bahan-bahan yang menjadi sumber penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini, pertama *heuristik* yaitu suatu teknik pengumpulan dan mengklasifikasi sumber, kedua *verifikasi* yaitu suatu teknik kritik terhadap sumber dalam mendapatkan nilai kesahihan dan kevalidasian sumber, ketiga *interpretasi* yaitu suatu teknik analisis dan sintesis atas sejumlah fakta dari sumber-sumber yang ditemukan. keempat *historiografi* yaitu sebuah langkah penulisan, pemaparan atas pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

## HASIL DAN DISKUSI

### 1. Bima Masa Pra Islam

Perkembangan dan perjalanan sejarah suatu bangsa, ikut dipengaruhi oleh keadaan geografis yang didiami oleh bangsa tersebut. Letak, luas wilayah, keadaan tanah dan iklim, saling mempengaruhi keadaan hidup dan kehidupan masyarakat. Daerah Bima terletak di

pulau Sumbawa bagian Timur. Memiliki luas diperkirakan pada tahun 2006 sekitar 4.870 km atau 1/3 dari luas pulau Sumbawa. Wilayah Bima sekarang ini mempunyai batas-batas berikut:



Gambar 1. Peta Wilayah Bima

- a. Sebelah Barat, dengan kabupaten Dompu.
- b. Sebelah Timur, dengan selat Sape.
- c. Sebelah utara, dengan laut Flores.
- d. Sebelah Selatan, dengan samudera Indonesia.

Pada masa sebelum pengislaman *dana mbojo* atau tanah Bima terbagi beberapa dalam beberapa wilayah. Pada setiap wilayah dikuasai oleh kelompok masyarakat yang dikepalai oleh *ncuhi* (kepala suku). *Ncuhi* dalam istilah orang – orang Bima dimaknai sebagai titik permulaan dari segala kehidupan orang – orang Bima, sehingga berbagai cerita terdahulu atau dalam naskah *BO* bisa kita jumpai ungkapan orang – orang Bima yang berbunyi “*sa wati pu londo na sia sangaji, na wa’ura wara dou labo dana na*” (sebelum turunnya dia sang raja, telah ada orang dan wilayahnya). Dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwa sebelum datangnya sang raja yang memerintah daerah Bima, terlebih dahulu terdapat orang – orang yang mendiami daerah Bima dengan wilayah kekuasaan tertentu.

Berdasarkan tuturan orang Bima secara turun – temurun atas rujukan *nuntu mantoi* (tuturan kisah zaman dahulu), ungkapan *Ncuhi* diperinci dengan sebutan :

- a. *Ncuhi edaru domo dou* (*Ncuhi* ialah orang yang menjdai sumber kelahiran bagi bagi keturunan secara terus menerus).
- b. *Ina mpu’u na weki ma rimpa* (manusia pertama yang menjadi cikal bakal kelompok masyarakat).
- c. *Di siri wea nggawo na* (tempat naungan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat).
- d. *Di batu wea lele na* (sumber ikutan dan panutan dimana segala tutur dan perintahnya wajib ditaati).

Dalam rumusan catatan kerajaan Bima (*BO*), daerah ini pernah melewati satu zaman yang dipimpin para tetua, kepala suku yang diberi gelar *ncuhi*. Sebelum zaman kerajaan, masyarakat Bima terdiri dari beberapa suku, yang dalam istilah Bima dikenal dengan *ncuhi*. *Ncuhi* ini terbagi dalam lima kelompok dengan pembagian wilayah yang jelas. *Ncuhi* Doro Wani menguasai wilayah Bima bagian timur. *Ncuhi* Bangsa Pupa menguasai Bima bagian utara. *Ncuhi* Dara menguasai Bima bagian tengah. *Ncuhi* Parewa menguasai bagian selatan Bima dan *ncuhi* Bolo menguasai bagian barat daerah Bima. Dari lima *ncuhi* tersebut, *ncuhi* Dara dipercayai sebagai pemegang keputusan dalam hal sengketa wilayah, sengketa antar-*ncuhi*, dan sengketa-sengketa lain yang terjadi di luar *ncuhi*. Melihat pola pemerintahan masyarakat Bima saat itu, dapat dikatakan Bima pada masa itu berbentuk masyarakat (negara) federasi.

## 2. Awal Masuknya Islam

Proses masuknya Islam di Bima sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Muhammad Ahmad dapat terbagi dalam empat fase. *Pertama*, pada abad XIV masyarakat Bima telah mengetahui tentang adanya agama Islam yang dianut oleh masyarakat pulau Jawa. *Kedua*, pada abad itu juga, datangnya para utusan/mubalig melalui pintu perdagangan dari Jawa, khususnya dari kesultanan Demak dan Gresik, untuk menyebarkan Islam di Bima. *Ketiga*, adanya beberapa orang masyarakat Bima yang memeluk agama Islam. *Keempat*, masuknya masyarakat Bima ke dalam Islam secara massal.

Dengan demikian, jika fase islamisasi di Bima dihitung sejak awal masyarakat Bima mengenal Islam, maka proses islamisasi itu telah dilakukan sejak abad XIV. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Chambert-Loir bahwa masyarakat Bima telah mengenal Islam dari Jawa yang disebarkan oleh para pedagang dan mubalig, baik datang sendiri atau yang secara khusus diutus oleh sultan Islam yang ada di Demak, Banten, dan Gresik. Adanya penerimaan informasi masyarakat Bima tentang Islam ini membuka komunikasi dan memancing rasa keingintahuan yang lebih dalam. Proses dialog dan diskusi agama (Islam) antara masyarakat Bima dan pendatang (pedagang) pun tidak terhindarkan. Dari proses dialog dan diskusi tersebut, sebagian masyarakat Bima memeluk agama Islam secara diam-diam.

Fase *ketiga* pengislaman tanah Bima tidak terlepas dari dakwah yang dilakukan oleh kerajaan Goa. Sebelas tahun setelah pengislaman Goa, sultan Alauddin, raja Goa XIV, giat menyebarkan Islam di wilayah Timur. Dalam sejarah Bima tercatat bahwa sebelum penyebaran Islam dengan peperangan, kerajaan Goa pernah mengutus beberapa orang untuk menyampaikan berita bahwa Sultan Goa, Luwu, Tallo, dan Bone beserta seluruh rakyatnya telah masuk Islam, dan sekaligus mengajak masyarakat Bima untuk masuk dan memeluk agama Islam. Rombongan sultan Goa tersebut selain menyebarkan Islam, juga membawa beberapa barang dagangan seperti *ci'lok* (piring emas), kain Bugis, dan keris. Rombongan Goa ini masuk lewat pelabuhan Sape (ujung Timur Bima) yang dipimpin oleh Daeng Mangali. Dalam catatan naskah kerajaan Bima (*BO*) tercatat bahwa ada empat orang Bima yang pertama masuk Islam, yaitu La Kai (Abdul Kahir) yang kemudian menjadi Sultan Bima I, Rato Waro Bewi, La Mbila dan Rato Bumi Jara. Keempat orang tersebut masuk Islam pada tahun 1621M. Dari sini kemudian Islam disebarkan ke seluruh Bima.

Fase *keempat* adalah tindak lanjut dari fase ketiga, yaitu empat orang Bima dan empat orang utusan Goa bergerak bersama untuk menyebarkan Islam di wilayah Bima. Mulai dari Sape sampai Wera Sangia. Sebagai langkah awal dakwah ini didirikan masjid di desa Kalodu yang arsitekturnya didesain untuk menggambarkan peristiwa sejarah ini. Bentuk masjid bersegi empat yang disangga dengan delapan tiang, dan tidak bermihrab. Bentuk segi empat melambangkan kesediaan empat orang Bima yang masuk Islam dan disaksikan oleh empat orang saksi dari kesultanaan Goa, Tallo, Luwu dan Bone. Tiang yang delapan bermakna delapan arah penjuruan angin dan delapan orang yang bersatu dan sepakat untuk mengemban tugas dan amanah untuk menyebarkan Islam pada masa yang akan datang. Masjid yang dibangun tanpa mihrab adalah upaya penyamaran bangunan masjid agar terhindar dari pengejaran penguasa/musuh.

Ajaran Islam (*syari'ah*) yang dikembangkan di Bima adalah Islam yang lebih bernuansa sufistik. Hal ini dapat dilihat dalam keseharian masyarakat Bima yang kemudian diabadikan dalam lambang kesultanan Bima yang berbentuk burung garuda berkepala dua. Walau demikian, pengembangan Islam di Bima diatur dan dikembangkan dalam sistem pemerintahan. Corak keislaman yang dikembangkan di Bima adalah lebih dekat dengan pola dan corak keislaman yang dikembangkan di Sulawesi Selatan.

### 3. Metode Penyebaran Islam di Bima

Penyebaran, pertumbuhan, dan perkembangan Islam di Bima tidak terlepas dari peran Sultan Abdul Kahir sebagai Sultan Bima pertama. Pada tanggal 15 Rabi'ul Awal 1030 H (7 Februari 1621), Putra mahkota (Jena Teke) La ka'i (Abdul Kahir) dan tiga orang saudaranya mengucapkan dua kalimat syahadat dihadapan para mubalig. Sejak saat itu pemerintahan dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berlangsung selama ± 310 tahun. Seiring dengan hal itu, masuknya Islam telah membawa dampak dan pengaruh yang besar pada corak pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat Bima.

Sejak Ruma Ta Ma Bata Wadu dilantik menjadi sultan Bima yang pertama dengan gelar sultan Abdul Kahir, agama Islam menjadi kepercayaan hampir seluruh masyarakat Bima, hanya sebagian kecil saja yang tidak menerima dan memeluk agama Islam. Bahkan sampai sekarang ini agama Islam tetap menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Bima khususnya suku *Mbojo*. Suku *Mbojo* dikenal sebagai suku yang taat agama, hampir seluruh masyarakat menganut agama Islam. Suku *Mbojo* memiliki pandangan hidup "*Maja Labo Dahu*" yaitu malu dan takut melanggar larangan agama dan adat – istiadat. Jika terdapat masyarakat melanggar norma agama dan adat, misalnya, laki-laki beristri selingkuh (*zina*), maka dikenakan hukum agama (*dera*), hukum adat (*senda*), dan sangsi sosial (dikucilkan atau diusir).

### 4. Kedudukan Islam di Kesultanan Bima

Penduduk Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas, dan tidak dapat disangkal bahwa keberadaan kesultanan Islam di Indonesia pada masa lampau mempertegas eksistensi Islam, dan sebagai pemberi warna kehidupan sehari – hari bagi masyarakat di Nusantara. Bahwasanya Islam pada saat itu menjadi bukti dan merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan kita. Begitupun hal – nya yang terjadi pada kesultanan Bima.

Tanggal 15 Rabi'ul Awal 1050 H atau 5 Juli 1640 merupakan kalender yang sangat penting sebagai momentum bagi kebangkitan Islam di tanah Bima, pada hari itu berdiri sebuah negara Islam bernama kesultanan yang dipimpin oleh sultan dan dibantu oleh para ulama seperti layaknya negara Islam maka roda pemerintahan harus berdasarkan hukum islam dan adat yang islami, mulai saat itu ajaran agama *makamba-makimbi* harus segera ditinggalkan dan haram untuk dilaksanakan. Sultan bersama rakyat wajib menjalankan ajaran agama secara kaffah. Dalam mewujudkan cita-cita yang mulia itu, Sultan Abdul Kahir sebagai pemimpin bersama Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro sebagai ulama memiliki peran yang sangat menentukan, Sultan Abdul Kahir harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tampil sebagai pemimpin seperti sabda Rasulullah : " Sesungguhnya seorang pemimpin adalah perisai bagi masyarakat, di belakang dia berjuang didalamnya dia berlindung" (Bukhari Muslim).

Tugas yang diemban oleh Sultan Abdul Kahir, Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro sangat berat tetapi amat mulia, memang rakyatnya mayoritas beragama Islam tetapi masih banyak yang belum memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, terutama masyarakat yang jauh dari daerah pesisir pantai. Untuk mengatasi hal itu Sultan Abdul Kahir, Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro harus berkerja keras walau tenaga ulama masih terbatas, dan ada juga selain Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro peran para ulama Sape anak cucu dari empat mubalig Sulawesi Selatan sangat diharapkan oleh Sultan Abdul Kahir, beliau juga aktif berperan sebagai mubalig selain sebagai kepala pemerintahan.

### 5. Islam Dalam Kehidupan Sosial – Budaya Masyarakat Bima.

Islam hadir sebagai satu himpunan tata laku dan nilai yang membentuk kebudayaan baru bagi masyarakat dan gejolak kekuasaan Bima. Berbagai aspek pemikiran, spiritual, perilaku, dan moral menjadi tawaran yang menyegarkan bagi masyarakat dan kemelut kekuasaan kepada pewaris tunggal kerajaan Bima. Dalam perkembangannya Islam dijadikan sebagai

peradaban kesultanan Bima, walaupun tidak serta merta memupus kebiasaan (kepercayaan atau budaya lama) masyarakat Bima beralih kepada agama Islam.

Guna lebih memperluas penyebaran dakwah, ulama dan pemerintah mencari strategi – strategi khusus untuk menyebarkan nilai dan ajaran Islam. Strategi itu adalah asimilasi atau penggabungan antara nilai – nilai agama Islam dengan budaya masyarakat Bima. Sehingga antara peradaban dan kebudayaan tersebut menjadi satu dan searah dengan tujuan agama Islam. Lebih dari itu, Islam juga membawa satu konsep yang baru bagi kemaslahatan masyarakat Bima, yaitu konsep hidup mengenai hakikat yang berhubungan antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan Tuhannya. Sejalan dengan itu, Islam juga memberikan satu konsep mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditata dan diterima. Sehingga Islam datang bukan hanya ingin mengkonstruksi keyakinan jiwa masyarakat Bima, tetapi sekaligus merekonstruksi kepercayaan dan budaya yang menjadi satu pedoman masyarakat agar kembali kepada Tuhan yang hakiki. Islam juga mengajarkan para pemimpin Bima tentang kekuasaan tunggal dan mutlak hanya milik Allah. Disinilah letak fungsi Islam sebagai *social control* bagi masyarakat.

Artinya, Islam melalui ayat – ayat Al-qur’an menjadi solusi masalah sosial yang terjadi di tengah – tengah masyarakat Bima. Di sisi lain, penyerapan nilai Islam ke dalam tradisi masyarakat memiliki tujuan jangka panjang, yaitu melakukan rekayasa sosial demi mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Nilai – nilai baru yang diserap bersifat universal yang dapat diimplementasikan ajaran universal Islam. Ajaran universal ini yang perlu dielaborasi untuk melakukan reproduksi kebudayaan pada masa sekarang maupun yang akan datang. simbol atau media untuk mengimplementasikan ajaran universal Islam, sehingga akan terjadi perbedaan atau variasi antara masyarakat Islam yang satu dengan masyarakat Islam lainnya. Kebudayaan lokal akan selalu ada di dalam masyarakat mana pun dan harus mendapatkan perhatian khusus dalam membumikan Islam ditengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Bima. Seperti, penentuan acara pernikahan yang selalu disesuaikan dengan hari – hari besar Islam. Itu dilaksanakan setelah musim panen seperti bulan Maulud, bulan Rajab, dan bulan Zulhijah.

## 6. Penerapan Hukum Islam Di Bima

Sebelum tahun 1908, penataan kehidupan beragama Islam dalam masyarakat Bima dilakukan oleh “Syara Hukum”. Pelaksanaan tugas pokok “Syara Hukum” dilakukan oleh lembaga yang dimanakan Mahkamah Syar’iyah. Didalam Mahkamah Syar’iyah itu terdapat bagian – bagian atau satuan organisasi yang menata aspek – aspek kehidupan yang menyangkut pemerintahan dan pemasyarakatan.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan, Mahkamah Syar’iyah menitik beratkan aktivitasnya pada masalah pernikahan, perceraian, kewarisan, pewakafan, pendidikan, dakwah dan pengaturan kegiatan keagamaan lainnya seperti penetapan awal bulan Ramadhan, dan hari – hari besar Islam lainnya. Adapun kedudukannya sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Syar’iyah mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan penegakkan hukum Islam, baik yang menyangkut perkara pidana maupun perkara perdata. Sebelum tahun 1908, Mahkamah Syar’iyah turut berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana dilakukan dua tahap, pertama pemeriksaan meliputi pokok perkara yang dilakukan oleh suatu majelis yang diketuai oleh *Tureli Parado* dan beranggotakan Majelis Tureli, kedua pertimbangan hukum yang akan menentukan bnetuk dan besarnya sanksi hukum diperiksa dan diberikan oleh Mahkamah Syar’iyah, karena hukuman atas tindakan pidana itu harus dilihat dari kacamata hukum Islam.

Setelah tahun 1908 tatkala pemerintahan kolonial Belanda mulai melaksanakan campur tangan dalam pemerintahan kesultanan Bima, perkara pidana dialihkan kepada majelis Rapat Besar, Rapat Tengah, dan Rapat Rendah. Dengan keterlibatan langsung kolonial Belanda

terhadap pemerintahan kesultanan Bima memberi pengaruh yang cukup besar terhadap penegakan hukum Islam dan sebagian besar kewenangan Mahkamah Syar'iyah dihapus, sehingga hukum Islam tidak diterapkan lagi.

## 7. Masuknya Belanda di Bima

Kontrak pertama antara kesultanan Bima dengan VOC telah dimulai pada abad ke-17, ketika terjadi perjanjian lisan antara raja Bima atau raja Salisih dengan orang VOC bernama Steven Van Hagen yang dikenal sebagai sumpah *ncake*. Namun secara politis hubungan kesultanan dengan Belanda mulai berlangsung dengan ditandatanganinya perjanjian Rotterdam I yang bertempat di Batavia, pihak Belanda yang diwakili oleh admiral Speelman sedangkan di pihak kesultanan Bima diwakili oleh *Jeneli* Monta, Abdul Wahid dan *Jeneli* Parado, La Ibo atas nama sultan Bima, pada tanggal 8 Desember 1669. Berdasarkan perjanjian ini, maka perdagangan Bima diawasi dan dibatasi oleh Belanda sehingga kesultanan boleh berdagang dengan pihak kompeni saja. Selain itu, penggunaan fasilitas pelabuhan Bima oleh armada dagang Belanda bebas dari pungutan bea dan cukai. Dengan demikian, perjanjian tersebut sangat merugikan kesultanan Bima sehingga tingkat kehidupan masyarakat Bima merosot tajam dan menggiring mereka ke lorong kemiskinan (Chambert Loir & Salahuddin, 1999).

Meskipun secara resmi kerajaan Bima dinyatakan telah berada dibawah kekuasaan kompeni, pelaksanaan pemerintahan kerajaan sepenuhnya berjalan menurut kebijaksanaan Sultan Abdul Khair Sirajudin, birokrasi tradisional tetap berjalan terkecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan perdagangan menjadi monopoli VOC. Dalam keadaan seperti ini pemerintahan pribumi berfungsi sebagai penghubung antara penguasa VOC (Belanda) dengan penduduk setempat untuk menjamin kepentingannya, baik berupa pajak maupun tenaga kerja. Para penguasa pribumi dengan pengaruh tradisionalnya yang kharismatik diharapkan dapat memenuhi kepentingan patronnya, dalam hal ini penguasa VOC, namun sebaliknya kepentingan para penguasa pribumi tetap dijamin oleh penguasa VOC karena kekuasaannya tetap dipertahankan, demikian juga dengan hak-hak yang dimilikinya. Dengan demikian, sistem politik dan birokrasi tradisional yang sudah berjalan dan mapan tetap dilanjutkan, terkecuali dalam berbagai hal yang dianggap penting seperti pergantian takhta, bahkan perkawinan dikalangan elit penguasa kerajaan, pemerintah VOC turut campur, langsung maupun tidak langsung. Untuk mengurus dan mengendalikan kekuasaan VOC dibidang perdagangan, di Bima ditempatkan seorang kuasa usaha yaitu Khojah Ibrahim. Pada tahun 1701 Belanda membangun benteng dan loji. Kemudian menempatkan petugas-petugasnya yang berpangkat Kopman dan Onderkopman. Hubungan Bima dengan VOC dan kemudian setelah VOC gulung tikar dilanjutkan dengan pemerintah Hindia Belanda berlangsung sampai awal abad ke-20, baik dengan penempatan para pejabat di Bima atau melalui kantor pemerintah kompeni yang berpusat di Makassar, karena secara administratif Bima digabung ke dalam (dengan) *Celebes en Onderhoorigheden* (Sulawesi dan wilayah sekitarnya).

Kontrak yang tertanggal 26 Mei 1792 antara kesultanan Bima dan pemerintahan Belanda menjadi kontrak awal pada pemerintahan Sultan Abdul Hamid dengan pihak Belanda adapun isi perjanjiannya sebagai berikut :

- a. Bahwa Abdul Kadim Muhammad Syah zi'lu'llahi fi'l 'alam raja Bima yang telah meninggalkan negeri yang fana lalu ke negeri yang baka qalu inna li'llahi wa inna 'illaihi raji'un kepada 1773, sebab itulah maka segala wazir menteri-menteri dan segala orang besar-besar di Bima bermufakat sekalian akan melakukan sebagaimana adat yang telah biasa kepada tanah Bima, maka ia menjadikan raja Abdul Hamid Muhammad Syah zillu'llahhi fil-alam akan menggantikan ayahnya serta ia menantikan diteguhi serta dikuati oleh kompeni mufakatnta sekalian orang Bima ini, inilah maka tentulah ia menjadi raja di Bima adanya. Sebab itulah kami ini Abdul Hamid Muhamad Syah zilll'llahi fi'l alam maka

lambat kami datang kemari di Mengkassar melakukan adat sebagaimana biasa kepada waktu kami dijadikan raja itu sebab kami lagi amat muda kepada waktu itu dan lagi terlalu amat banyak aral melintang kami datang membaharui kontrak perjanjian yang telah sudah diperbuat oleh tanah tanah Bima dengan kompeni, baharulah kami ini datang kemari dengan segala wazir menteri-menteri kami serta orang besar – besar kami sekalian hendak meneguhi kontrak perjanjian kompeni dengan tanah Bima. Maka bukannya juga itu mengatakan kontrak perjanjian yang dahulu-dahulu itu juga kami teguhi, tambahan lagi kontrak.

- b. Perjanjian yang sudah dibaharukan serta dipersumpahkan oleh paduka ayahanda kepada sembilan hari bulan Februari tahun 1765. Adapun perkataan yang tersebut di dalam kontrak itu telah sudah kami ketahui sekalian itu sebab telah sudah dibacakan kami serta diartikan baik – baik maknanya sekalian dan lagi diberi kami memegang suatu teladannya, dan lagi kami mengaku mau melakukan jikalau ada barang sesuatu hendak ditambahi atau dikurangi oleh tuan Jenderal dan segala raden van India di Betawi perkataan kontrak perjanjian itu, dan lagi kami berjanji dan mengaku akan menurut dan melakukan, tambahan lagi sekalian orang yang di bawah takhta kerajaan kami, kami hendak sekalian itu menurut dan melakukan sebagaimana perkataan kontrak perjanjian itu jangan sekali-kali ia melalui adanya. Adapun tandanya sesungguhnya kami berjanji dengan hati yang tulus ikhlas kami akan menurut serta melakukan perkataan tiga kontrak perjanjian itu, istimewa lagi yang ada tersebut didalam perkara tiga dan empat dan lima dan enam sebab kami meneguhi perkataan kami ini, inilah maka kami mengangkat sumpah atas Qur'an dan meminum air keris kami dengan segala wazir menteri – menteri kami serta kami meletakkan ke dalam surat ini cap kami tanda keesaan kami meneguhi kontrak.
- c. Perjanjian ini dihadapan yang maha mulia paduka tuan Heer Gurundur dan Rat di Mengkassar demikian adanya (Naskah Perjanjian Bima/375/20).

Pada tahun 1909 secara administratif Bima digabung ke dalam (dengan) *Timor en Onderhoorigheden* (Timor dan wilayah sekitarnya) yang pusatnya di Kupang. Menurut catatan J.E. Jasper. Selama berkuasa, pemerintah kompeni (Belanda dan Inggris) telah menempatkan 54 pejabatnya di Bima dalam berbagai jabatan atau pangkat, yaitu Residen, Comandant, Onderprefect, Asisten Residen, Gezaghebber, Controleur dan Aspirant Controleur (Haris, 2012).

Selain dari pada perjuangan kedaerahan yang dilakukan di Jawa, Sumatera, Aceh dan lainnya ternyata rakyat Bima juga pernah melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Bima adalah sebuah daerah yang terletak di Pulau Sumbawa di wilayah NTB, pada masa kolonialisme, kesultanan Bima berada pada wilayah *celebes* dibawah pemerintahan Hindia-Belanda. Setelah berhasil memenangkan perang Aceh 1904, atas perintah dari Parlemen Hindia belanda, Letkol H.N.A Swart yang saat itu diperintahkan untuk memperbaharui "*Lange Contract*" yang pernah disepakati antara Dinasti VOC dengan Sultan Bima yaitu Sultan Abdullah 9 November 1857, dan juga perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati oleh kesultanan-kesultanan Sumbawa, Dompu dan lainnya. Paska perlawanan Aceh atas kolonialisme Belanda sejak tahun 1873 hingga 1904, pihak Belanda domain mengalami kerugian secara finansial, akibat dari itu pemerintah Hindia Belanda kemudian harus melakukan politik praktis untuk memperluas kekayaan finansial demi keberlanjutan agresi Belanda di Nusantara.

Tahun 1905 utusan Belanda dari Makassar tiba di kesultanan Bima untuk mengajak Sultan Ibrahim bekerjasama dalam agenda perjanjian persahabatan untuk mempererat hubungan antara kesultanan Bima dengan perintah Hindia – Belanda, namun wacana itu kemudian ditolak tegas oleh Sultan Ibrahim "*ma wa'a taho parange*" bersama dengan ruma bicara yakni Muhammad Qurais. Penolakan itu kemudian dibalas murka oleh Letkol H.N.A Swart, akhir tahun 1905, Gezaghebber sipil yakni A.A Banse kemudian diutus untuk



menyampaikan pesan kepada Sultan Ibrahim, apabila pihak kesultanan tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Hindia-Belanda maka seluruh wilayah kekuasaan Bima akan dibumi hanguskan. Ancaman ini membuat Sultan Ibrahim dilematis dalam mengambil sikap, apabila Sultan Ibrahim bekerjasama dengan Belanda maka tentu rakyat nantinya akan sengsara akibat dari penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, namun apabila Sultan Ibrahim menolak bekerjasama dengan Belanda maka Bima akan dibumi hanguskan. Atas dasar *Lange Contract* 1857, Controuller Belanda di Bima yaitu A.A Banse kemudian mengambil kebijakan sepihak dengan memberlakukan pajak yang tinggi kepada rakyat Bima, 1 Januari 1907 Belanda kemudian menerapkan *bea tuta*, pajak penghasilan, pajak hasil panen, pajak ekspor dan lainnya, regulasi-regulasi yang diskriminasi itu kemudian diperkuat dengan ancaman Belanda bahwa apabila pihak kesultanan tidak mau bekerjasama dengan Belanda, maka Belanda akan membumi hanguskan Bima (Saridjo, 2012).

#### 8. Kebijakan Belanda Terhadap Kesultanan Bima Sampai Perang Ngali

Kontak awal Kesultanan Bima dengan Belanda, yang kemudian diikuti dengan pembuatan kontrak, didorong terutama oleh berkembangnya kepentingan kolonial atas daerah – daerah. Pada akhir abad ke-19, khususnya setelah tahun 1885, terjadi perluasan pesat perhatian dan kepentingan kolonial yang ditopang oleh modal kapitalis swasta untuk mencari lahan yang lebih menguntungkan dan sasarannya ditunjukkan untuk daerah luar Jawa khususnya Kesultanan Bima sebagai pengganti Jawa yang telah lama dieksploitasi demi kepentingan pemerintah Kolonial Belanda. Kehidupan perekonomian masyarakat Bima antara lain dalam bidang pertanian, peternakan, berburu, perdagangan dan perikanan. Selanjutnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kegiatan yang berkembang di Kesultanan Bima adalah penguasaan mutiara, kulit mutiara, teripang di perairan Bima yang dilakukan oleh Belanda berdasarkan izin atau kontrak dari Sultan Ibrahim (1888-1915) (Chambert Loir, 2010).

Selanjutnya pada bulan Desember 1906, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan pajak kepala dan pajak penghasilan di Kesultanan Bima. Pajak ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1907. Pajak semacam ini sudah diberlakukan di Sulawesi Selatan yang disebut *Sima Katalassang* oleh orang-orang Makassar atau *Sima Assaparang Atuoang* oleh orang-orang Bugis. Pajak di atas diberlakukan di wilayah *Celebes en onderhoorigheden* (Celebes atau daerah taklukan) termasuk Bima. Pajak tersebut mengharuskan rakyat Bima membayar pajak 1/20 dari hasil panen padi sehingga setiap rumah ditargetkan harus membayar pajak f 2,50. Pada tahun 1907 ditargetkan terkumpul uang sejumlah 30.000 gulden di Sumbawa Besar, 39.000 gulden di Bima (termasuk Manggarai), 5.000 gulden di Dompu, dan 150 gulden di Sanggar (Rosdiana & Ilham, 2014).

Secara politis hubungan kesultanan Bima dengan Belanda mulai berlangsung dengan ditandatanganinya perjanjian Rotterdam I antara pihak Belanda yang di wakili oleh admiral Speelman dengan pihak kesultanan Bima yang di wakili oleh *Jeneli* Monta Abdul Wahid dan *Jeneli* Parado La Ibo atas nama sultan Bima pada tanggal 8 Desember 1669.

Pada saat perpolitikan Kesultanan Bima mulai membaik, Belanda berusaha mencari berbagai macam cara atau taktik agar bisa menancapkan pengaruhnya di Kesultanan Bima. Belanda mengirim utusan yang beragama Islam keturunan Arab bernama Khoha Ibrahim dengan tujuan mempengaruhi Sultan Ismail. Khoha Ibrahim berhasil membantu kelancaran monopoli perdagangan Belanda dengan mempengaruhi sultan dalam menentukan kebijakan pemerintah (Ismail, 2004).

Keberhasilan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah Belanda untuk mengikat Kesultanan Bima dengan perjanjian yang sangat merugikan dan merampas kedaulatan kesultanan Bima secara terselubung, isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut:

- a. Angkatan laut Bima tidak boleh mengganggu dan menyerang kapal – kapal Belanda yang berlabuh dan berlayar diperairannya.
- b. Angkatan laut Bima harus membantu Belanda untuk memerangi bajak laut.
- c. Kesultanan Bima harus memberikan bahan-bahan perdagangan berupa beras, ternak, kulit ular, kulit buaya sebagai upeti. Bahan-bahan itu selama enam bulan dikumpulkan dan diserahkan terlebih dahulu di lapangan Sera Suba, kemudian diangkat oleh kapal – kapal Belanda.
- d. Kesultanan Bima harus menyerahkan tanah yang berada dekat pelabuhan Lawa Due untuk mendirikan benteng Belanda dimana Belanda mempunyai hak teritorial.
- e. Pengangkatan sultan harus mendapat persetujuan Gubernur Militer Belanda di Makasar (Tayib, 1995).

Berdasarkan isi perjanjian di atas suasana politik di kesultanan Bima semakin memburuk karena pemerintah Hindia-Belanda mempunyai hak monopoli perdagangan dan hak mendirikan benteng di Lawa Due atau hak teritorial. Selain itu, angkatan laut Bima harus membantu Belanda untuk memerangi bajak laut, padahal bajak laut merupakan pelaut Makasar yang merupakan saudara seperjuangan melawan Belanda. Dengan demikian, isi perjanjian tersebut menimbulkan keresahan rakyat di kesultanan Bima karena hasil pertanian rakyat Bima diserahkan secara cuma-cuma kepada Belanda. Selain itu, pemerintah Belanda juga ingin merampas kedaulatan kesultanan Bima. Perjanjian ini dilanjutkan pada masa Sultan Abdullah. Pada saat Sultan Abdullah naik Tahta, suasana politik di kesultanan Bima sangat buruk karena Belanda berusaha untuk memperbaharui isi perjanjian yang dibuat pada masa Sultan Ismail. Sultan Abdullah tidak pernah mentaati isi perjanjian karena isi perjanjian tersebut jelas-jelas merugikan kesultanan Bima dan tidak sesuai dengan jiwa patriotisme yang diperlihatkan oleh sultan. Bahkan *Ruma Bicara* Muhammad Ya'kub selaku pedamping Sultan Abdullah mengambil tindakan yang berani, antara lain sebagai berikut :

- a. Membubarkan angkatan laut kesultanan Bima, agar tidak diperalat Belanda untuk menghancurkan pejuang Makassar, Bugis, Ternate, Tidore yang dianggap sebagai bajak laut oleh Belanda.
- b. Para pejuang tersebut dilindungi bahkan diberi kebebasan untuk mendiami daerah Manggarai untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dan juga melakukan dakwah.
- c. Gerak-gerik Belanda dibatasi serta diawasi oleh kesultanan Bima.
- d. Upeti sedikit demi sedikit dihilangkan (Rosdiana & Ilham, 2014)

## 9. Faktor-Faktor Meletusnya Perang Ngali

Pada bulan Mei 1907 para tokoh masyarakat Ngali Kejenelian Belo menolak kehadiran Jena Mone Na'e (petugas pemungut pajak) yang dikirim sultan untuk melakukan penagihan pajak dan cacah jiwa. Akibat penolakan itu, Sultan Ibrahim mengirim utusan ke Ngali untuk mencari penyelesaian. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Gelarang Ngali, tokoh masyarakat dan pemuka agama (ulama), wakil sultan menyampaikan amanat sultan untuk menerima kekuasaan pemerintah Belanda, menjelaskan rencana pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak dan pendapatan penduduk. Rencana tersebut ditolak dengan tegas karena para tokoh berpendapat bahwa sultan tidak peduli lagi pada nasib rakyatnya. Karena itu, memenuhi perintah sultan berarti mengakui kekuasaan kolonial Belanda, tunduk dibawah pemerintah Belanda yang kafir akan menghancurkan negeri, dan mengikuti sensus penduduk berarti menyetujui berkembangnya sistem perbudakan baru, yakni pengerahan tenaga kerja paksa untuk kepentingan Belanda.

Pada bulan Oktober 1907, *Gezaghebber* sipil Albert Adolf Banse melaporkan kepada Gubernur Sipil dan Militer Sulawesi dan daerah sekitarnya bahwa situasi politik di Bima tidak menguntungkan, sementara Sultan Ibrahim tidak dapat menguasai keadaan. Gubernur

Sulawesi Letnan Kolonel H.N. A. Swart mengutus Van der Zwaan untuk mengamati situasi politik disana. Di Bima, Zwaan menyaksikan bagaimana Gelarang dan penduduk desa Ngali menolak diadakannya sensus dan pembayaran pajak (Effendy, 2011).

Penduduk kesultanan Bima didominasi oleh pemeluk agama Islam. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat Bima sangat taat kepada aturan-aturan Islam. Ketaatan ulama dan masyarakat Bima dalam menjalankan syari'at agama memberi dampak positif. dalam segala aktifitas kehidupan masyarakat. Wajar apabila ulama dan rakyat Bima menentang penjajahan Belanda atau orang kafir karena dalam ajaran Islam diajarkan tentang konsep jihad fi sabilillah. Menurut pemahaman mereka berjuang melawan orang kafir dibenarkan dalam Islam bila melalui jihad. ideologi jihad merupakan faktor utama yang memunculkan perlawanan terhadap penjajah Belanda atau dikenal dengan perang Ngali (Djakariah, 1995).

### 10. Jalannya Peristiwa Perang Ngali

Berdasarkan hasil rapat di Palibelo dan Palipena antara Sultan Ibrahim dengan Galarang yang terdapat di Kejenelien kesultanan Bima, maka mereka membulatkan tekad melawan kolonial Belanda. Melihat situasi inilah maka Galarang Salasa Ompu Kapa'a, ulama, pemuka masyarakat dan golongan bangsawan melakukan musyawarah bersama yang diadakan di Masjid Raya desa Ngali (Tayib, 1995).

Pada bulan November 1908 pasukan Belanda menyerang Bima pada malam hari. Laskar Bima yang bermarkas di masjid raya, memberikan perlawanan sengit. Dipihak laskar Ngali gugur sebagai Syuhada, Salasa Ompu Kapa'a, H. Muhammad dan pengawalnya Adam dan Kada, bersama 60 orang anggota laskar, mereka disergap pada tengah malam dikala melakukan sholat tahajud. Dipihak Belanda ratusan anggota pasukan mati ditikam dan ditombak oleh laskar Ngali, diantaranya Letnan JHC Vastenour dan Letnan M. Schoten. Kuburan pasukan Belanda itu oleh masyarakat disebut "*Rade Mbari*" atau kuburan Bari Masyarakat Bima menyebut orang Belanda dengan bari. Karena banyak anggotanya mati terbunuh oleh laskar desa Ngali, pasukan Belanda mundur dan meninggalkan desa Ngali.

Peristiwa perang Ngali melawan kebijakan kolonial Belanda yang terjadi pada tahun 1908-1909. Sampai semua pelakunya meninggal dunia, Dalam dua tahun dua dekade terakhir usaha penulisan atau usaha merekonstruksikan perang Bima (Ngali) sudah mulai dilakukan oleh beberapa penulis orang Bima. Terjadi perang Ngali, karena para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat desa Ngali menolak perintah pungutan pajak oleh bangsa kafir Belanda (Saridjo, 2012).

Para ulama *dou* Ngali berpengang teguh pada ayat Al-qura'an: "*Jangalah orang Islam menjadi orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin*", karena terlalu lemah dan tunduk mengikuti kemauan Belanda, Sultan Ibrahim dianggap sebagai boneka kaum kolonial. Perang Ngali adalah perang melawan kaum kolonial Belanda yang dilakukan penduduk Ngali. Perang ini terjadi pada tahun 1908-1909, perang Ngali terjadi karena penduduk Ngali menolak pungutan berbagai pajak yang dirasakan sangat membebani rakyat umumnya, bermata pencaharian pokok sebagai petani dan nelayan. Tetapi sebagai alasan bahwa pajak memberatkan, dalam pandangan masyarakat Ngali pada masa itu sudah dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat dan fanatik mereka tidak relah diperintah kaum kafir Eropa (Saridjo, 2012).

Pimpinan para tokoh masyarakat dan ulama di antaranya pernah menjadi mukminin di Mekkah, rakyat Ngali siap melakukan perang terhadap kaum kafir Belanda. Karena dorongan utama perang melawan Belanda itu demi menjaga kesucian agama Islam dan mempertahankan martabat dan harga diri sebagai umat Islam, maka perang Ngali adalah untuk dapat dijadikan sumber informasi tertulis bagi generasi berikutnya. Yang dapat dilihat oleh masyarakat, atau generasi muda sampai saat ini sebagai saksi sejarah bahwa memang terjadi perang di desa Ngali terhadap kuburan massal Belanda, yang oleh penduduk setempat disebut: Rade Bari

(Kuburan bari= Serdadu/orang berbaris) maksudnya serdadu/pasukan Belanda. Saksi sejarah kedua adalah Rade Bugi (Kuburan orang Bugis), terletak di desa Monta, sebelah Barat desa Ngali. Pada saat terjadi perang, kedua pihak berhadapan dan mengadu kekuatan jarak dekat di tengah sawah dekat desa Monta. Para pejuang Ngali menghadap rombongan pasukan pribumi yang diminta Sultan atau dipaksa Belanda berasal dari suku Bugis yang menetap di Kecamatan Sape, dikawasan paling Timur kabupaten Bima sebagai pembuka jalan untuk menumpas rakyat Bima, Dalam pertempuran persenjataan tombak, keris, parang dan lain-lain. Malang bagi pasukan Bugis yang di kenal gagah berani itu, hampir semuanya tewas di tangan rakyat Ngali. Karena begitu banyak yang gugur, mayat-mayat orang Bugis tidak sempat di angkut oleh temannya yang masih hidup. Konon satu dua yang masih hidup kabur berlari menyelamatkan diri ke arah desa Sakuru. Akhirnya mayat-mayat yang bergelimpangan itu, di kuburkan secara massal di tengah sawah dekat desa Monta.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bima telah mengalami berbagai macam bentuk pemerintahan sebelum kehadiran Islam yang diantaranya adalah masa *Naka*, masa *Ncuhi* dan masa kerajaan. Pada kurun waktu yang begitu lama masyarakat diselimuti oleh kepercayaan *Makakamba*, *Makakimbi* dan agama Hindu. Pada masa *Naka* taraf kehidupan masyarakat masih primitif, berpindah pindah dari satu tempat ketempat lain dan senantiasa hidup berkelompok. Setelah posisi *Naka* diganti oleh *Ncuhi* taraf kehidupan terjadi banyak perubahan sampai berdirinya kerajaan Bima.
2. Dalam kajian ini Bima merupakan daerah yang sangat strategis terletak di tengah – tengah jalur perdagangan rempah-rempah dari Malaka menuju Maluku. Oleh karena itu, Kerajaan Bima muncul sebagai salah satu kota bandar terpenting di Nusa Tenggara. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan kerajaan Bima sebagai kota bandar dan kota perdagangan terpenting di Nusa Tenggara, karena letak geografis yang strategis inilah kerajaan Bima mendapat kontak dari luar dan Sulawesi merupakan sumber pertama agama Islam yang datang ke Bima. Gelombang Islam yang datang berikutnya bersumber dan dibawa oleh para mubalig dari Jawa dan mereka dipandang sebagai aktor ikut mendukung dan memapankan perkembangan agama Islam di Bima.
3. Fenomena sosial seperti pemakaian *rimpu* dan tradisi *boho co'I* (pranikah) mempertegas bahwa telah terjadinya asimilasi budaya antara budaya lokal dengan paduan ajaran dan syariat Islam. Identitas yang terbaru ini menjalar ke-sebagian daerah Bima pasca mendapat kontak kesultanan Goa dari Makassar. Apabila merujuk dari catatan *BO* (catatan kerajaan Bima) menunjuk dua nama penting, yaitu Datuk Ri Banda dan Datuk Ri Tiro sebagai pembawa-awal Islam ke Bima bahkan turut serta mentransformasikan dari sistem kerajaan yang bercorak Hindu menjadi sistem kesultanan yang bercorak Islam dan dipimpin oleh seorang Sultan pertama Sultan Abdul Kahir (La Ka'i) yang tidak lain dari murid Datuk Ri Banda dan Datuk Ri Tiro, ada juga sumber lain yang menyatakan bahwa untuk fase pertama Islam masuk melalui pintu perdagangan dengan wilayah Jawa seperti kesultanan Demak dan Gresik yang telah mengutuskan para mubalighnya dalam menyiarkan Islam untuk wilayah bagian timur.
4. Bermula dari perjanjian Bongaya di awal abad ke-17 kesultanan Bima menjadi koloni Belanda. Belanda juga melarang Bima mempunyai hubungan politik dan perdagangan dengan kerajaan dan daerah lain. Dengan demikian, Belanda membatasi hubungan perdagangan Bima dengan daerah lain sehingga perdagangan yang dilakukan oleh rakyat Bima mengalami kemerosotan. Intervensi Belanda di kesultanan Bima tidak berhenti pada perjanjian Bongaya dan perjanjian Rotterdam I saja tetapi perjanjian-perjanjian tersebut beberapa kali diperbaharui dan diperbaiki. Hal ini terlihat pada masa abad ke-19 yaitu pada masa pemerintah Sultan Ismail, Sultan Abdullah, Sultan Abdul Azis dan pada masa Sultan Ibrahim dimana

Belanda berhasil mengikat kesultanan Bima dengan perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang). Perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) ini merupakan cara yang strategis yang digunakan oleh Belanda untuk menguasai dan mengikat kesultanan Bima dalam berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia-Belanda. Intervensi Belanda di Kesultanan Bima ini mencapai klimaksnya pada masa Sultan Ibrahim. Pada masa ini, pemerintah Belanda berhasil menguasai Kesultanan Bima melalui perjanjian *Lange Contract* (Kontrak Panjang). *Lange Contract* (Plakat Panjang) ini Belanda memberlakukan peraturan pajak dan sekaligus menguasai wilayah kesultanan Bima sehingga perjanjian ini sangat merugikan Kesultanan Bima. Perjanjian tersebut menjadi sebab terjadinya perlawanan rakyat Ngali yang anti terhadap penjajah Belanda atau orang kafir. Pada Suasana yang mencekam itu, tampil tokoh-tokoh yang didambakan oleh rakyat mereka datang dari berbagai golongan dan lapisan yang mewakili seluruh rakyat. Sultan yang mengalami kesulitan untuk menjalankan pemerintahan tanpa bantuan para bangsawan dan elite tradisional yang mempunyai pengaruh kuat pada berbagai kelompok masyarakat. Perlawanan yang memberi pertanda bahwa keadaan tertekan terjadi pada kalangan yang luas sehingga sultan tidak dapat mengatasinya. Dalam situasi demikian sultan berada dalam posisi yang dilematis diantara dua arus kepentingan; mengakomodasi tuntutan rakyat, atau membiarkan Belanda bertindak untuk pencapaian tujuan – tujuan politiknya. Tampilnya tokoh – tokoh di daerah seperti para haji dan para elit agama yang menjadi pemimpin gerakan dapat dipahami adanya semangat Islam untuk memerangi kaum kafir Belanda.

5. Perlawanan bermula dari sebuah desa Ngali yang secara *de facto and de jure* masuk dalam daerah administrasi Kab. Bima yang diprakarsai oleh Salasa Ompu Kapa'a bersama seluruh masyarakat Ngali. Mereka menjadikan masjid Ngali, yang sekarang diberi nama masjid Syuhada sebagai markas pertahanan masyarakat Ngali. Perang yang berlangsung dalam 3 tahap besar ini, berakhir dengan tewasnya pimpinan ekspedisi Belanda, Letnan Vastenour, berikut ratusan marsosenya. Dengan taktik “membunuh kejut” dan” membunuh senyap” banyak prajurit Belanda yang meregang nyawa, terbukti di kampung Soro desa Ngali ada kuburan massal prajurit Belanda yang disebut “Rade Bari” yang berarti kuburan dari pasukan marsose Belanda yang datang berbari-baris dan meninggal pasca perang Ngali tersebut. Selama pertempuran yang berlangsung pada 20 Februari 1908 itu, Ngali berhasil diduduki pada jam 12.30. Dalam serangan siang itu pasukan marsose berhasil melumpuhkan 65 orang pejuang. Tokoh – tokoh dari golongan bangsawan, ulama dan rakyat tersebut tampil untuk memimpin rakyat dalam Perang Ngali. Tokoh dari golongan bangsawan dan keluarga istana seperti Abbas Daeng Manasa yang populer dengan panggilan La Ebo, Dae Sambu, Dae Eso (La Usu), Dae Seo yang berasal dari anak cucu Ruma Bicara Ahmad Daeng Manasa. Ada pula tokoh yang mewakili golongan agama, seperti H. Said H. Abdul Aziz, H. Yasin, H. Usman dan tidak ketinggalan Gelarang Ngali (pemimpin masyarakat Ngali) Salasa Ompu Kapa'a.
6. Setelah terjadinya peristiwa perang Ngali dan mendapatkan kekalahan atas serangan melawan kolonial Belanda, penduduk desa Ngali mengalami ketiadaan papan dan sandang. Kampung mereka telah di bumi hanguskan, sehingga tidak ada tempat berteduh dari hujan dan terik matahari. Bahan pangan seperti beras dan hasil tani dan palawija seperti padi, jagung, ubi jalar, dan lain-lain semua jadi *puso* (rusak) baik karena tidak bisa di rawat atau rusak karena cuaca atau sengaja di rusak oleh Serdadu Belanda.

## REFERENSI

- Chambert-Loir, Henri & R. Salahudin, Siti Maryam. (1999). *Bo' Sangaji Kai*. Jakarta: Obor Indonesia
- Chambert-Loir, Henri & R. Salahudin, Siti Maryam. (2010). *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*. Gramedia dan *Ecole Francaise D'Exeteme-Orient*.

- Chambert-Loir, Henri. (1985). *Cerita Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa*. Bandung : Angkasa dan *Ecole Francaise D'Exeteme-Orient*.
- Chambert-Loir, Henri. (2004). *Kerajaan Bima Dalam Sastra dan Sejarah*. Jakarta : Gramedia.
- Effendy, Muslimin A.R. (2011). Dou, Ruma Labo Dana: *Political Dynamics In The Sultanate Of Bima, 1905-1957. Dissertation*.
- Hamzah, Muslimin. (2004). *Ensiklopedia Bima*. Yogyakarta : Lenge Group.
- Hamzah, Saidin. (2017, April) Condition of Pre-Islamic Mbojo (Bima) Fund in Historical Review. *Journal of Islamic Discourse: Vol.05 No.1*.
- Haris, Tawalunuddin. (2012). *Masuknya Islam Dan Munculnya Bima Sebagai Pusat Kekuasaan Islam Di Kawasan Nusa Tenggara*.
- Ismail, M. Hilir. (2004). *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Nusantara*. Mataram: Adikarya IKAPI *Foundation*
- Ismail, M. Hilir. (2008). *Kebangkitan Islam Di Dana Mbojo(Bima):1540-1950*. Bogor: Binasti.
- Rosdiana & Ilham. (2014). *Kesultanan Bima Sebelum Meletusnya Perang Ngali Pada Abad Ke – 19 Dan Awal Abad Ke – 20*.
- Saridjo, Marwan. (2012). *Perang Ngali Sebuah Perang Sabil*. Bogor: Al-Manar Press.
- Tajib, Abdullah. (1995). *Sejarah Bima dana Mbojo*. Jakarta: PT, harapan massa PGRI.